

Terorisme, Mungkinkah Diselesaikan?

Otje Soedioto & Angel Damayanti

Rencana peledakan dua mobil berisi beberapa tabung gas dan paku di kawasan The Haymart, kota London, serta serangan bom di pintu masuk Bandar Udara Internasional Glasgow, Scotlandia, pada akhir bulan Juni lalu semakin mempertegas bahwa para pelaku teror bukan monopoli mereka yang tidak terpelajar dan berasal dari golongan ekonomi lemah. Setelah dibongkar oleh jaringan keamanan Inggris, ternyata teroris tersebut adalah para intelektual yang kesemuanya berprofesi sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit di Irak, India dan Telford.

Mantan Kepala Komite Intelijen Gabungan Inggris, Pauline Neville-Jones mengatakan bahwa para pelaku teror itu sepertinya memanfaatkan kondisi negara di mana sedang terjadi proses pergantian pemerintahan dari Mantan Perdana Menteri Tony Blair kepada Perdana Menteri Gordon Brown. Insiden bom di Glasgow ini memang terjadi hanya sehari setelah Brown mengumumkan kabinet barunya. Dan mengingat Brown mengadakan sejumlah perubahan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya – termasuk yang terkait dengan isu invasi ke Irak - rasanya tidak berlebihan jika kita asumsikan bahwa aksi terorisme ini terkait dengan keinginan para pelaku agar pemerintah

Inggris segera menarik pasukannya dari Irak.

Menariknya, dalam hitungan hari, di Brisbane, Queensland, kepolisian Australia berhasil meringkus salah satu aktor intelektual yang diduga keras memiliki keterkaitan dalam perencanaan insiden di Inggris tersebut. Keberhasilan jaringan keamanan baik Inggris maupun Australia tersebut patut diacungi jempol karena menunjukkan kemampuan yang sempurna di dalam mengorganisir proses perlawanan terorisme yang sudah mengglobal.

Kejadian tersebut membuktikan bahwa jaringan terorisme internasional memiliki cengkraman yang sangat kokoh dan karenanya perlu diimbangi dengan tindakan kontra-terorisme yang tidak kalah kuatnya. Di sinilah kita semua perlu mengakui bahwa terorisme merupakan masalah internasional yang membutuhkan penanganan yang komprehensif dan bersama. Di samping itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa tindakan teror tidak semata dilandasi oleh fanatisme agama tertentu melainkan juga oleh keinginan untuk melepaskan diri dari dominasi negara kuat terhadap negara lemah dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang ditim-

bulkan akibat dominasi tersebut.

Namun jauh sebelum itu, Kent Layne Oots, dalam bukunya yang berjudul *A Political Organization Approach to Transnational Terrorism*, mendefinisikan terorisme sebagai: (1) *a psychological or military act designed to create fear or cause material or economic destruction*; (2) *a method of constraining the behavior of others, this is often done through attacks on victims other than the real target to act*; (3) *a crime committed for publicity*; (4) *a crime with a political purpose*; (5) *as purposive violence*, (6) *a criminal act committed for political or economic gain*.

(Terorisme adalah (1) sebuah tindakan psikologis atau militer yang dibuat untuk menciptakan ketakutan atau menyebabkan kerusakan ekonomi dan material; (2) sebuah cara untuk memaksa perilaku orang lain yang seringkali dilakukan melalui penyerangan terhadap para korban dan bukannya target yang sebenarnya dituju; (3) tindakan kriminal yang bertujuan untuk publisitas; (4) tindakan kriminal dengan maksud politik; (5) sebagai sebuah kekerasan dengan maksud tertentu; dan (6) tindak kriminal yang ditujukan untuk tujuan politik atau ekonomi.)

Akar Masalah Terorisme

Berangkat dari penjelasan di atas, memang benar bahwa isu terorisme adalah masalah bersama yang harus ditangani secara menyeluruh. Akan tetapi, pada hemat kami ada hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam menangani masalah terorisme ini, yaitu bahwa cara penanganan tersebut perlu dipilah-pilah berdasarkan akar permasalahannya.

Artinya, kita tidak bisa menggeneralisir proses kontra terorisme tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh dunia Barat dengan menggunakan pisau analisa atau kacamata mereka. Mereka cenderung menggolongkan terorisme ke dalam sebuah bentuk fundamentalisme atau fasisme agama Islam. Akibatnya, penanganan terhadap terorisme ini diidentikkan dengan perlawanan terhadap budaya, agama dan negara Islam. Hal inilah yang dianggap oleh sebagian orang sebagai *Clash of Civilizations* yang diungkapkan pertama kali oleh Samuel Huntington pada tahun 1993.

Namun Prof Dr. Juwono Sudarsono menyatakan bahwa perbenturan peradaban antara Barat dan Islam tidak bisa disamakan dengan perlawanan

Barat terhadap terorisme karena tidak selamanya tindakan teror itu dilandasi oleh agama Islam. Banyak serangan bom yang dilakukan oleh warga Irak lebih disebabkan pada perebutan kekuasaan antar suku, seperti juga yang terjadi dengan kelompok Hamas dan Fatah di Palestina, dan Irlandia Utara dan Selatan di Irlandia hingga tahun 1980-an.

Karena itu, untuk dapat menangani masalah terorisme menurut hemat kami perlu dilihat inti persoalannya yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Runtuhnya Uni Sovyet pada awal tahun 1990-an mau tidak mau telah mengakibatkan Amerika Serikat seolah-olah menjadi penguasa tunggal politik dunia. Sehingga dengan segala keadikuasaannya AS cenderung untuk mendominasi dan mendikte negara-negara di dunia ini. Lihat saja bagaimana AS tetap menginvasi Afghanistan dan Irak meski organisasi internasional seperti PBB dan negara-negara lain telah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana dan tindakan AS itu.

Kecenderungan tersebut jelas me-

nimbulkan reaksi dari negara-negara yang tidak termasuk dalam aliansi politik AS, antara lain tindakan teror seperti yang terjadi di mana-mana saat ini, terutama ditujukan kepada mereka yang menjadi sekutu dari AS atau yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan AS dan teman-temannya.

2. Kebijakan ekonomi AS yang didasari oleh pemikiran neoliberalisme dan kemudian diwujudkan melalui *World Bank* atau *International Monetary Fund* (IMF) dengan harapan dapat membantu menyejahterakan negara-negara berkembang malah menjerumuskan negara-negara dunia ketiga ini ke dalam jerat hutang yang menambah beban dan kemiskinan.

Pinjaman yang diberikan oleh AS dan sekutunya melalui kedua lembaga keuangan internasional tersebut secara sepiantas dan dalam kurun waktu singkat memang membantu meningkatkan perekonomian makro negara-negara debitur. Namun kenyataannya secara mikro, penduduk negara-negara itu tidak serta merta ikut merasakan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebaliknya, timbul ketimpangan an-

tara *the have* dan *the have not*, sehingga dirasakan menjadi ketidakadilan oleh mereka yang tidak menikmati pertumbuhan ekonomi. Keadaan seperti ini potensial untuk memicu tindakan terorisme.

3. Reaksi negatif yang timbul akibat dominasi politik dan ketidakadilan ekonomi yang disebabkan oleh AS sangatlah beragam. Mulai dari pendekatan yang halus seperti diplomasi yang digunakan oleh Indonesia sampai dengan cara keras, seperti hujatan yang dilemparkan oleh Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad kepada pemerintahan Bush.

Namun, sayangnya cara-cara ini kerap diabaikan oleh negara Paman Sam tersebut. Akibatnya ada aktor-aktor non negara semacam kelompok Al Qaeda dan Jamiah Islamiyah yang berkeyakinan bahwa tindakan teror merupakan cara yang paling efektif untuk mengekspresikan protes mereka kepada AS. Namun, tentu saja pilihan tindakan ini terkait dengan ideologi yang dianut dan tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok tersebut.

Dengan melihat pemilahan pemicu aksi terorisme di atas, negara-negara, khususnya negara AS dan Barat yang kerap menjadi sasaran tindakan terorisme, diharapkan mampu mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat dalam menangani aksi terorisme yang bersifat lintas negara itu. Analoginya, seorang pasien yang sakit tidak bisa sembarangan ditangani atau diberikan obat apalagi disama-ratakan dengan pasien lainnya, melainkan perlu dicari tahu sumber penyakitnya dan barulah penanganan yang diberikan akan efektif guna menyembuhkan penyakit pasien tersebut.

Terorisme di Indonesia

Jika pada bagian sebelumnya kita telah mengetahui hal-hal umum mengenai terorisme serta aksinya yang bersifat lintas batas negara, lantas bagaimana dengan terorisme di Indonesia? Dan cara seperti apakah yang paling efektif untuk menangani masalah ini?

Menurut sejarahnya, terorisme di Indonesia sesungguhnya sudah diawali sejak adanya gerakan-gerakan yang berkeinginan untuk mendirikan negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan

Pancasila dan UUD 1945. Keinginan ini terus berlanjut sampai hari ini.

Lebih lebih, untuk mencapai tujuan tersebut, mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis yang berupa peledakan gedung-gedung dan bahkan sampai memakan korban nyawa manusia yang tak berdosa. Sampai tahun 2005 lalu, sedikitnya telah terjadi empat belas peristiwa yang ditimbulkan oleh aksi teroris yang terjadi di Indonesia, yaitu peledakan di gedung Atrium Senen pada 1 Desember 1998; di Plaza Hayam Wuruk pada 15 April 1999; di Masjid Istiqlal pada tahun 1999; di Gereja GKPI Medan pada 28 Mei 2000; di Kedubes Filipina, Jakarta tahun 2000; di Gedung Atrium Senen pada 1 Agustus 2001; di Manado November 2002; di Mc Donald Makasar pada 5 Desember 2002; di Hotel J.W Mariot, Mega Kuningan Jakarta pada 5 Agustus 2003; di depan Kedubes Australia, Jl. Rasuna Said Kuningan, Jakarta pada 9 September 2004 dan Bom Bali II, tanggal 1 Oktober 2005.

Menariknya, menurut para pengamat terorisme, dari sejumlah serangan bom di atas, ada empat peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh para pelaku teror, yaitu yang terjadi di

Hotel JW Marriot, Kedubes Australia serta Bom Bali 1 dan 2, sementara yang lainnya hanya berupa bom yang diletakkan di dalam mobil atau tempat tertentu. Menurut sumber yang dapat dipercaya, para pelaku bom tersebut dibantu secara finansial oleh jaringan terorisme internasional Al Qaeda di bawah pimpinan Osama Ben Laden. Hal ini bisa terjadi karena ada catatan Al Qaeda akan membantu para pelaku teror di Indonesia hanya jika mereka bersedia bunuh diri dalam melaksanakan aksinya.

Dengan demikian, terjadi sebuah keuntungan timbal balik. Kelompok Al Qaeda diuntungkan karena mereka berhasil melumpuhkan kepentingan AS dan Barat di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dan gerakan terorisme di Indonesia diuntungkan dengan adanya aliran dana yang bisa mendukung serta mengembangkan pencapaian misi mereka.

Bahkan, lebih dari itu, berdasarkan ideologi dan keyakinan mereka, kelompok ini membenarkan untuk melakukan tindak-tindak kekerasan sebagai upaya untuk mencapai tujuan akhir mereka (*Machiavelistik*, "the ends justify the means" yang artinya "tujuan menghalalkan cara.") Padahal

dalam ajaran agama maupun budaya mana pun membunuh orang yang tidak berdosa/bersalah merupakan tindakan yang amat tercela dan tidak dibenarkan.

Di samping itu, perlu juga kami kemukakan di sini bahwa secara struktur-organisatoris, jaringan terorisme internasional ini memiliki empat divisi teritorial atau komando wilayah pertahanan yang disebut sebagai Mantiqi. Mantiqi ini meliputi wilayah yang luas mulai dari Semenanjung Malaysia, Singapura, Indonesia hingga Australia.

Dari keempat Mantiqi ini, Malaysia dan Singapura dijadikan sebagai Mantiqi 1 yaitu tempat para pelaku bekerja dan menghimpun dana untuk kemudian dialirkan ke kelompok teroris yang beroperasi di Indonesia. Wilayah Indonesia dibedakan menjadi 2 Mantiqi. Pertama, Sumatera dan Jawa dijadikan sebagai tempat sasaran atau target operasional, sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Ambon termasuk Filipina dijadikan sebagai wilayah pelatihan. Dan terakhir, Australia dijadikan sebagai mantiqi keempat yang rencananya dijadikan sebagai target operasi berikutnya.

Berkaitan dengan masalah ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Setelah melihat dampak-dampak yang merugikan akibat dari aksi terorisme yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, maka pada tahun 2004, pemerintah RI mengeluarkan tiga program kerja guna mencegah dan menanggulangi aksi terorisme di Indonesia.

Program-program tersebut adalah:

1. Program pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara yang mencakup peningkatan kemampuan profesional intelijen; kordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah, pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen, serta pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.
2. Program pengembangan pengamanan rahasia negara yang meliputi kegiatan: penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang menguasai persandian kontra terorisme, penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme, pengadaan dan pengembangan peralatan persandian pendukung

operasional anti teror, dan perluasan jaringan komunikasi sandi dalam rangka kontra terorisme.

3. Program pemantapan keamanan dalam negeri yang di dalamnya mencakup: peningkatan keberadaan desk terorisme untuk penyiapan kebijakan, peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa, mengadakan komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif untuk mencegah berkembangnya potensi terorisme serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror, peningkatan kerjasama regional negara-negara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme, penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan *Weapon of Mass Destruction* (WMD), penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme, pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran aset kelompok teroris, peningkatan pengawasan keimigrasian dan upaya interdiksi darat, laut dan udara.

Respons pemerintah yang demikian

itu jelas harus didukung oleh semua komponen bangsa demi mempertahankan keutuhan bangsa dalam bentuk negara kesatuan seperti yang dicita-citakan oleh para bapak bangsa. Bung Karno, Bung Hatta dan semua *founding fathers* kita telah menyadari sepenuhnya bahwa bangsa Indonesia ini merupakan suatu bangsa yang sangat majemuk dalam banyak hal. Untuk mencegah terjadinya pemecahbelahan bangsa dan negara ini, maka dipilih dan ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan pedoman hidup.

Selama enam puluh tahun lebih, Pancasila telah mampu mempertahankan eksistensinya dari segala macam batu ujian atau rongrongan. Oleh karenanya, demi masa depan bangsa Indonesia, kita harus meyakini bahwa Pancasila merupakan benteng pemersatu bangsa sebab ia mampu mengakomodir kepentingan agama apa pun bahkan aliran kepercayaan yang ada dan tumbuh di negara ini.

Upaya Nyata Penanggulangan Terorisme

Dunia telah menjadi saksi bahwa beberapa tokoh gerakan terorisme

telah ditangkap dan diadili. Contohnya antara lain Abu Bakar Ba'asyir, Dr. Azhari, Mukhlas, Amrozi, dan yang baru-baru ini tertangkap, Abu Dujana. Setidaknya aparat keamanan telah berhasil menangkap lebih dari 400 orang pelaku teror di Indonesia. Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah memiliki kesungguhan untuk memerangi terorisme yang merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia di dunia tanpa kecuali.

Namun demikian, apa yang telah dicapai oleh pemerintah saat ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Kenyataannya, kelompok JI memiliki kemampuan untuk beroperasi secara sistematis dengan sturuktur organisasi yang khusus dan longgar sehingga tidak mudah untuk dideteksi, lebih-lebih dimusnahkan. Misalnya, pada saat aparat keamanan menangkap orang yang dicurigai sebagai teroris, mereka bisa saja berkelit mengaku sebagai aktivis mesjid.

Di sinilah diperlukan peran intelijen yang handal dan perofesional untuk bisa bekerjasama dengan aparat keamanan, sehingga mereka (para intel) dapat memberikan informasi kelas wahid pada aparat keamanan agar peringkusan dapat terlaksana secara sempurna.

Terkait dengan peran intelijen yang handal ini, pernyataan Perdana Menteri Australia, John Howard, baru-baru ini yang mengeluarkan *travel warning* bagi warga negaranya yang hendak berpergian ke Indonesia karena kemungkinan kegiatan terorisme, perlu kita tanggapi secara positif dan kongkrit. Pernyataan Howard tersebut mempunyai dasar yang patut kita hargai mengingat peristiwa serangan bom di Kedubes Australia, Bom Bali 1 dan 2 terjadi pada sekitar bulan September – Oktober.

Di samping itu, dengan ditembak matinya Dr. Azhari dan tertangkapnya beberapa gembong teroris seperti Mukhlis, Amrozi dan Abu Dujana bisa saja para teroris yang berada di bawah komando mereka akan bertindak dengan brutal dan membabi-butakan sebagai balas dendam atau dalih melanjutkan perjuangan. Oleh karenanya, kami menghimbau dengan sangat agar pemerintah Indonesia menanggapi pernyataan intelijen Australia tersebut dengan sungguh-sungguh dan memperhitungkan segala kemungkinan sehingga tidak kecolongan lagi.

Dalam kaitan inilah, jaringan intel kita perlu ditingkatkan secara optimal. Keberadaan desk terorisme di bawah

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang telah dibentuk sejak tahun 2002 perlu juga diubah statusnya dan dimasukkan dalam struktur instansi tersebut demi efisiensi serta efektivitas kinerja mereka. Peranan masyarakat juga tidak ketinggalan pentingnya untuk memberikan informasi kepada jaringan keamanan atau intel tadi mengingat bahwa pelaku teror itu berasal juga dari masyarakat. Selain itu, seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa terorisme adalah masalah dunia yang berarti masalah kita bersama dan untuk itu dalam menanganinya perlu dilakukan kerjasama secara intensif antar bangsa yang beradab, tanpa mengurangi kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing. Dengan demikian masalah terorisme dapat kita atasi bersama secara menyeluruh dengan selalu memegang teguh eksistensi serta harga diri setiap bangsa dan negara. □

Sumber :

Wawancara dengan:

1. Prof. Dr. Juwono Sudarsono
2. KH. Abdurrahman Wahid
3. Rhousdy Soeryaatmadja (Kepala Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme)